



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

**KANTOR KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Alamat Kantor:
Jalan Pamong Praja No.02
Desa Mandiri Kecamatan Tomoni
Kabupaten Luwu Timur**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Tomoni dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Tomoni sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Tomoni Tahun 2023 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tomoni, Februari 2024



CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan	6
D. Kondisi Geografis	6
E. Komposisi SDM Organisasi.....	7
F. Struktur Organisasi.....	10
G. Peran Organisasi.....	11
H. Isu Strategis.....	11
I. Inovasi Organisasi.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21
C. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	27
D. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja OPD.....	37
B. Realisasi Anggaran.....	63
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan LHE Kinerja Tahun 2022.....	68
BAB IV PENUTUP.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	8
Tabel 1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 2.2	Sasaran dan Indokator Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 2.3	Program yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2023...	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Tahun 2023.....	23
Tabel 2.5	Penjelasan atas sasaran, indicator sasaran dan target yang ditetapkan tahun 2023.....	25
Tabel 2.6	APBD Perubahan Tahun 2023.....	27
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026	33
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja.....	37
Tabel 3.2	Capaian IKU Tahun 2023.....	38
Tabel 3.3	Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 (sasaran 1).....	39
Tabel 3.4	Perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya (sasaran 1).....	42
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi (sasaran 1) sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah (Renstra 2021-2026).....	44
Tabel 3.6	Perbandingan target dan realisasi tahun 2023 (sasaran 2)...	54
Tabel 3.7	Perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya (sasaran 2).....	55
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi (sasaran 2) sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah (Renstra 2021-2026).....	56
Tabel 3.9	Analisis atas efisiensi SDM.....	58
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya (Sasaran 1)	43
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah (Renstra 2021-2026)	44
Grafik 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya (Sasaran 2)	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tomoni selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Tomoni diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Tomoni menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2023 adalah untuk memenuhi kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja melalui media laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2023 adalah :

1. Mempertanggung jawabkan kinerja Kantor Kecamatan Tomoni kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Internal Kantor Kecamatan Tomoni.

C. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN

Pada Tahun 2003, Kabupaten Luwu Utara mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 pada tanggal 23 Februari 2003. Kabupaten Luwu Timur pada saat itu terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Kecamatan Mangkutana | 5. Kecamatan Angkona |
| 2. Kecamatan Nuha | 6. Kecamatan Wotu |
| 3. Kecamatan Towuti | 7. Kecamatan Burau |
| 4. Kecamatan Malili | 8. Kecamatan Tomoni |

Kecamatan Tomoni terbentuk dari pemekaran Kecamatan Mangkutana, setelah terbentuk Luwu Timur, Kecamatan Tomoni juga mengalami pemekaran desa yang tadinya 19 desa di wilayah Kecamatan Mangkutana menjadi 13 desa di wilayah Kecamatan Tomoni. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomot 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Tomoni dimekarkan lagi menjadi dua yaitu Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni Timur.

Kecamatan Tomoni berkembang pesat dibandingkan dengan induknya Kecamatan Mangkutana, hal ini disebabkan karena banyaknya pendatang dan penduduk local yang berusaha dibidang perdagangan lain halnya dengan kecamatan induknya yang rata-rata penduduknya berusaha dibidang pertanian dan perkebunan.

D. KONDISI GEOGRAFIS

Luas wilayah Kecamatan Tomoni 230,09 km² atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 (dua belas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 49 dusun/lingkungan dan 117 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Kelurahan Tomoni
2. Desa Lestari
3. Desa Mulyasri

4. Desa Bayondo
5. Desa Beringin Jaya
6. Desa Kalpataru
7. Desa Tadulako
8. Desa Sumber Alam
9. Desa Ujung Baru
10. Desa Mandiri
11. Desa Bangun Jaya
12. Desa Bangun Karya
13. Desa Rante Mario

Jumlah Penduduk Kecamatan Tomoni pada tahun 2023 sebanyak 24.496 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2023) dengan rincian : laki-laki sebanyak 13.389 jiwa dan perempuan sebanyak 13.107 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.828 KK. Penduduk Kecamatan Tomoni merupakan penduduk yang heterogen baik suku maupun agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Tomoni yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

E. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ORGANISASI

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Tomoni dan Kantor Kelurahan Tomoni per tanggal 31 Desember 2023 adalah 24 (dua puluh empat) orang PNS dan 28 (dua puluh delapan) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	4	6	3	2	15

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
3	Golongan II	-	-	-	8	8
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		5	6	3	10	24

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	-	11	2	2	15
3	Golongan II	-	-	-	8	8
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	11	2	10	24

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	8	14	24
2	Fungsional	-	-	-	-	-

3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	8	14	24

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.4

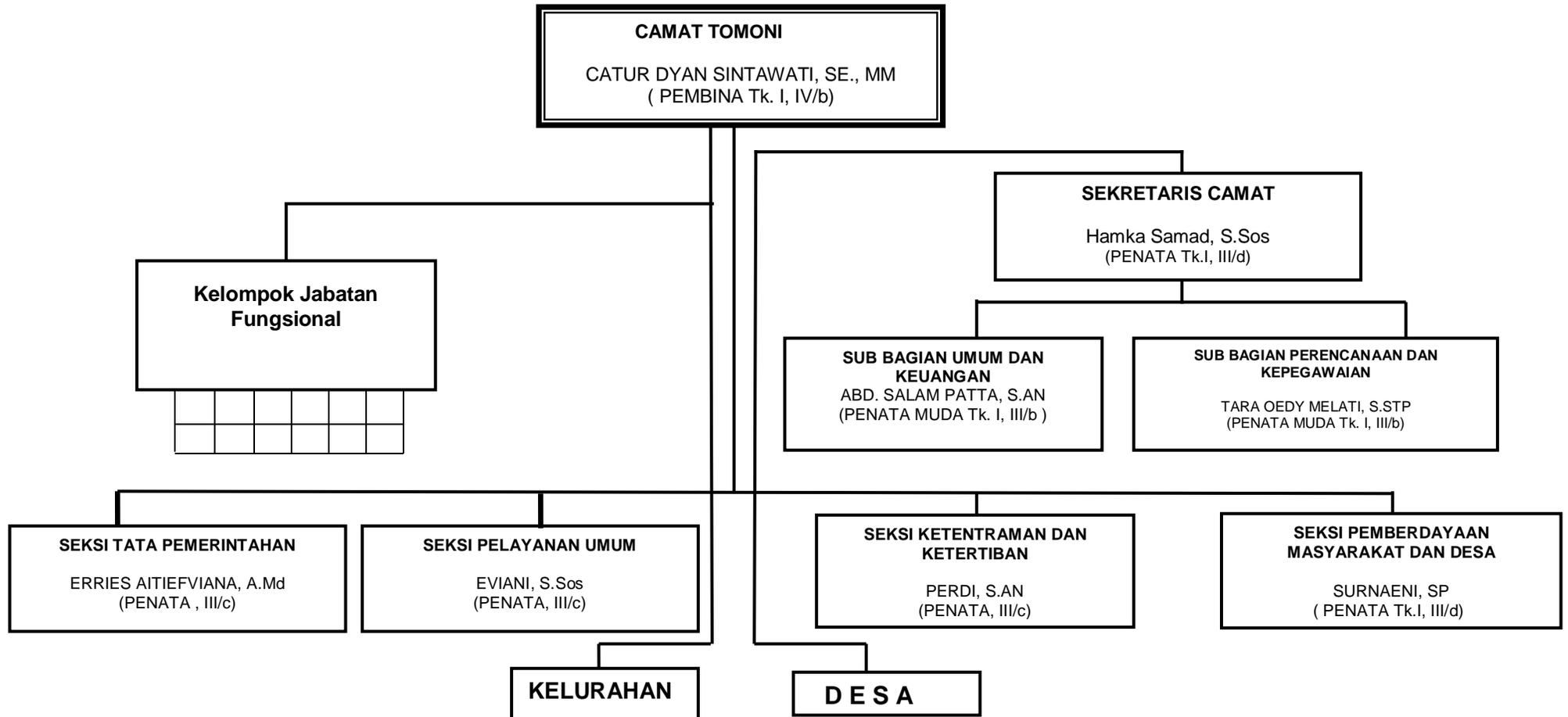
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	24
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	28
JUMLAH		52

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

F. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TOMONI



G. PERAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

H. ISU STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Tomoni tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima baik dari aspek pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Tomoni yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan;

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

I. INOVASI ORGANISASI

Pada Tahun 2023 Kantor Kecamatan Tomoni mencanangkan sebuah inovasi “PELITA” Peduliki sayangiki lansia ta, inovasi ini berkolaborasi dengan Puskesmas Tomoni dan Pemerintah Desa se Kecamatan Tomoni. Lansia sering dianggap sebagai golongan yang lemah, tetapi sesungguhnya lansia memiliki peran yang berarti bagi masyarakat. Lansia memiliki penalaran moral yang bagus untuk generasi dibawahnya. Namun tidak bisa dipungkiri, secara fisik lansia lebih beresiko dan rentan mengalami gangguan kesehatan. Maka dari itu lansia membutuhkan lebih banyak perhatian dari lingkungan di sekitarnya.

Dikecamatan tomoni sendiri, terdapat kurang lebih sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) orang lansia yang telah berhasil di data dengan kondisi yang beragam, diantaranya ada yang hidup sebatang kara, ekonomi kurang mampu, kondisi kesehatan yang buruk dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Wujud dari usaha pemerintah kecamatan Tomoni dalam memberikan pelayanan prima khususnya kepada para lansia adalah dengan dicanangkannya program inovasi PELITA (Peduli ki Sayangi ki Lansia ta) Kecamatan Tomoni, nama PELITA diberikan dengan harapan inovasi ini bisa menerangi dan membuat lansia yang awalnya kurang mendapatkan perhatian menjadi lebih terlihat dan bisa mendapatkan banyak perhatian oleh banyak pihak. PELITA kecamatan tomoni akan dilakukan secara berkesinambungan untuk membantu para Lansia yang ada di desa/kelurahan di wilayah kecamatan Tomoni dengan memberikan bantuan-bantuan berupa makanan, pemeriksaan kesehatan dan identifikasi jenis

kebutuhan lainnya. Hingga saat ini kurang lebih 65 (enam puluh lima) orang lansia yang telah dikunjungi, kunjungan tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan bahan pangan, melakukan screening kesehatan dan identifikasi kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan oleh lansia berupa ketersediaan sanitasi lingkungan yang baik, air bersih, listrik dan lain sebagainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Tomoni.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

a. Visi dan Misi

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Tomoni sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi-Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur adalah mendukung misi ke-1, misi ke-4 dan misi ke-5 RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yaitu : Misi 1 “meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh”, Misi 2 “menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik” dan Misi 4 “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh masyarakat”.

b. Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Tomoni menetapkan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun. Kantor Kecamatan Tomoni menetapkan Tujuan 5 tahun yang ingin dicapai yaitu :

- 1). Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni yang memiliki makna bahwa dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai OPD pelayanan public Kantor Kecamatan Tomoni selalu mengupayakan peningkatan mutu pelayanan pada aspek pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban serta pembangunan dan pemberdayaan desa. Alat ukur untuk menilai bahwa telah terwujud kualitas/mutu pelayanan, Kantor Kecamatan Tomoni menetapkan 2 indikator tujuan, yaitu Persentase Peningkatan Nilai IKM (%), Pelayanan yang bermutu/berkualitas merupakan salah satu tolak ukurnya kepuasan yang berefek terhadap keinginan masyarakat untuk kembali datang ke Kantor Kecamatan Tomoni untuk menerima pelayanan yang dibutuhkan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula persentase peningkatan kepuasan yang diterima masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi

faktor kepuasan karena, dengan memberikan pelayanan yang baik maka masyarakat pun akan merasa aman dan nyaman. Tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan public dengan pengisian kuesioner.

- 2). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan Tomoni yang memiliki maksud bahwa Kantor Kecamatan Tomoni sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodic untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya . adapun indicator tujuan yang ditetapkan adalah Nilai LAKIP setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat.

Berikut Indikator kinerja dan target kinerja untuk tujuan strategis rumah sakit diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Tomoni

	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Peningkatan Nilai IKM	Persen	0,55	2,69%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat Kecamatan Tomoni	Nilai LAKIP Kecamatan Tomoni	Nilai	62	67

c. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Kecamatan Tomoni ada 2 yaitu 1). Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat 2). Meningkatkan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni dengan indicator Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.

Berikut ini adalah sasaran dan indicator sasaran Kantor Kecamatan Tomoni sesuai dokumen renstra periode 2021-2026 (mengacu PermenPAN-RB

Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja
Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	86
Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	%	100	100

d. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENDUKUNG
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. 2) Kegiatan pemberdayaan kelurahan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Sinergitas dngan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat 2) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

	<p style="text-align: center;">Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</p> <p>1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</p> <p>a. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan</p> <p>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p> <p>1) Fasilitasi, rekomendasi dan kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p> <p>a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan</p>
<p>Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan PD</p>	<p>6. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota :</p> <p>1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD</p> <p>2) Administrasi keuangan PD</p> <p>3) Administrasi barang milik daerah PD</p> <p>4) Administrasi pendapatan daerah kewenangan PD</p> <p>5) Administrasi kepegawaian PD</p> <p>6) Administrasi Umum PD</p> <p>7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD</p> <p>8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>9) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD</p>

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kecamatan Tomoni menyusun Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Renja Tahun 2023 dan DPA Tahun Anggaran 2023. Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Camat pada Kantor Kecamatan Tomoni sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Tomoni Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
2	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	100%
3	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
4	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%

5	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	100%
6	Meningkatnya capaian kinerja pada pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.334.331.227	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.676.300	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 347.020.055	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 11.800.643	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.150.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 24.205.200	APBD

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Pada perjanjian kinerja tahun 2023 diatas, Camat tomoni memperjanjikan 2 (dua) sasaran strategis dan juga 6 (enam) sasaran program, dimana sumber dana yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur. Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indicator sasaran dan target yang ditetapkan Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2023 :

Tabel 2.5
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang
Ditetapkan pada Tahun 2023

NO	SASARAN	PENJELASAN
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan public penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tomoni adalah suatu kapasitas pemerintah kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat baik dalam aspek pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik (administrasi dan non administrasi), keamanan dan ketertiban serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang diberikan sesuai norma, etika, hokum dan social budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat.
	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan masyakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan pengisian kuesioner. • Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indiks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan pada kantor kecamatan tomoni

		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
	TARGET	PENJELASAN
	81	Target IKM Kantor Kecamatan Tomoni diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 capaian IKM Kantor Kecamatan Tomoni 115,42, capaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan dan tahun 2023 Kantor Kecamatan Tomoni berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan target capaian.
	SASARAN	PENJELASAN
	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	<ul style="list-style-type: none"> • Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah • Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sector public dan anggaran berbasis kinerja
	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	❖ Presentase capaian terhadap rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Tomoni dalam 1 tahun

	Kabupaten Kecamatan (%)	di	
	TARGET		PENJELASAN
	100		Target yang ditetapkan menunjukkan kondisi ideal (tertinggi) yang bisa di capai oleh Kantor Kecamatan Tomoni

C. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kantor Kecamatan Tomoni maka jumlah pendanaan yang dapat dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.738.183.425,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Kantor Kecamatan Tomoni dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
APBD Perubahan Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	2,676,300
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	2,676,300
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	150 lembar	2,676,300
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	347,020,055
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	106,580,055

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	30%	16,355,900
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 Desa/ Kelurahan	90,224,155
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	240,440,000
	Pembangunan sarana dan prasarana	3 Kegiatan	185,800,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Kegiatan	54,640,000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	11,800,643
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	8,801,198
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	2,999,793
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kali	5,801,405
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2,999,445
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	12 Kali	2,999,445

	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	18,150,000
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	18,150,000
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100%	18,150,000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24,205,200
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24,205,200
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	7,315,200
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	12 Desa/ Kelurahan	16,890,000
Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4,334,331,227
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	21,344,146
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	11,965,646
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2,805,700

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2,876,400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3,696,400
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,832,193,091
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	2,825,993,091
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	6,200,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1,985,000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	1,985,000
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	26,030,000
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	12 Dokumen	26,030,000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	58,156,400
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Laporan	4,916,400
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	53,240,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	548,773,450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	5,238,050

	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	3 Unit	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Orang	48,574,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31099 Lembar	10,390,900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 Exp	8,040,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8500 ktk	185,910,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Kali	244,655,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	28,000,000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	140 unit	102,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	511,411,740
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	23,422,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132 Rek	50,689,740
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	18,500,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Orang	418,800,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	204,437,400

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	123,062,400
	Pemeliharaan Mebel	5 Unit	1,950,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44 Unit	18,460,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	60,965,000
JUMLAH		100%	4,738,183,425

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Kantor Kecamatan Tomoni memiliki 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran, dan untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut Kantor Kecamatan Tomoni menetapkan 2 (dua) indikator. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Tomoni didukung oleh 6 (enam) program dengan 16 (enam belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh anggaran belanja yang ada yaitu sebesar **Rp. 4.738.183.425,-**.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN TOMONI

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Pemerintah Kecamatan Tomoni yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026 KANTOR KEC. TOMONI

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kuesioner	Semua seksi	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public Kanror Kecamatan Tomoni) dengan pengisian kuesioner.
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Nilai Lakip	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Laporan Kegiatan	Semua seksi dan sub bagian	Inspektorat merupakan salah satu tim sakin kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Transisi 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir Renstra
						2023	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Peningkatan Nilai IKM (%)	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni		0,55	1,47	1,82	2,04	2,25	2,69	2,69
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	81	83	85	86	86
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Tomoni	Nilai LAKIP Kecamatan Tomoni (nilai)	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni		62	63	64	65	66	67	67
				Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran OPD.

Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012:72) Pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goal sand objectives*). Menurut Sony Yuwono (2008:29) sistem pengukuran kinerja yang baik bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Kantor Kecamatan Tomoni selaku unit kerja yang menerima sebagian pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah memiliki tugas pokok yang harus dipertanggungjawabkan, olehnya itu Kantor Kecamatan Tomoni diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA OPD

1. Capaian IKU Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan, capaian yang diraih pada Tahun 2023 dapat diuraikan tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	130,11	161%
2	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100	97,80	97,80%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian IKU pada sasaran Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni adalah 130,11% atau masuk criteria Sangat Tinggi dan capaian sasaran Meningkatkan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni 97,80% dengan katagori Sangat Tinggi. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja IKU Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2023 adalah masuk katagori **Sangat Tinggi** (capaian $91 \leq 100\%$).

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2023, dapat disampaikan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan belum semua dapat dicapai 100% yang disebabkan oleh berbagai kendala. Rincian analisis capaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

1) Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	130,11	161 %	Sangat Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indicator kinerja sasaran Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah capai target dengan realiasai 130,11 dan tingkat capaian 161% atau masuk katagori **Sangat Tinggi** ($91 \leq 100\%$).

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan Kecamatan Tomoni, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi, menunjukkan realisasi baik dari target 81 atau melampaui target dengan nilai survei 130,11 (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Tomoni.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur **Kompetensi Petugas dan Kualitas Sarana dan Prasarana** dengan nilai yang sama yaitu **811**.

❖ **Faktor penghambat**, kecamatan tomoni pada **unsur kompetensi petugas** mendapatkan nilai paling rendah pada penilaian IKM disebabkan karena jumlah personil yang masih kurang dan kompetensi sumber daya manusia yang di nilai masih kurang. Sebab msaih di temukan pegawai di kantor kecamatan tomoni yang belum memahami dengan baik terkait segala macam prosedur pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris, akta jual beli dan lain sebagainya. Selain unsur kompetensi petugas, **unsur kualitas sarana dan prasarana** juga mendapatkan nilai yang paling rendah, hal ini dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berstandar pelayanan pada kantor kecamatan tomoni, diantaranya adalah belum tersedianya loket pelayanan dan tidak ada petugas pelayanan yang selalu siap sedia untuk melayani masyarakat yang datang, sehingga masyarakat yang datang kekantor kecamatan tomoni tidak bisa

langsung mengetahui harus menuju keruangan mana untuk menerima pelayanan yang mereka butuhkan.

❖ **Solusi** untuk permasalahan **unsur kompetensi petugas** adalah dengan memberikan pemahaman kepada para pegawai kantor kecamatan tomoni terkait persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris dan jenis pelayanan lain. sehingga tidak ada lagi pegawai kantor kecamatan yang tidak memahami prosedur pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan. Sedangkan solusi untuk permasalahan pada unsur **kualitas sarana dan prasarana**, pemerintah kecamatan tomoni selalu berupaya untuk mengusulkan rehab kantor kecamatan tomoni agar bangunan kantor dibangun sesuai dengan standar pelayanan yang ada, pada tahun 2024, kantor kecamatan tomoni menganggarkan pembuatan meja pelayanan, sehingga proses pelayanan masyarakat bisa dilakukan 1 (satu) pintu, selain itu akan dilaksanakan juga perbaikan prosedur pelayanan agar masyarakat bisa dilayani dengan cepat dan mutu pelayanan bisa meningkat menjadi lebih baik.

b. Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada **unsur Penanganan Pengaduan** dengan nilai **865**.

❖ **Faktor pendukung** Kecamatan Tomoni pada **Unsur Penanganan Pengaduan** mendapat nilai tinggi, disebabkan karena pemerintah kecamatan tomoni telah berupaya semaksimal mungkin untuk bertindak cepat tanggap terhadap aduan yang diterima dari masyarakat, pada era digital seperti sekarang ini aduan masyarakat dapat disampaikan melalui banyak wadah, pemerintah kecamatan tomoni juga terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Namun begitu komunikasi dan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat juga masih harus ditingkatkan kembali.

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

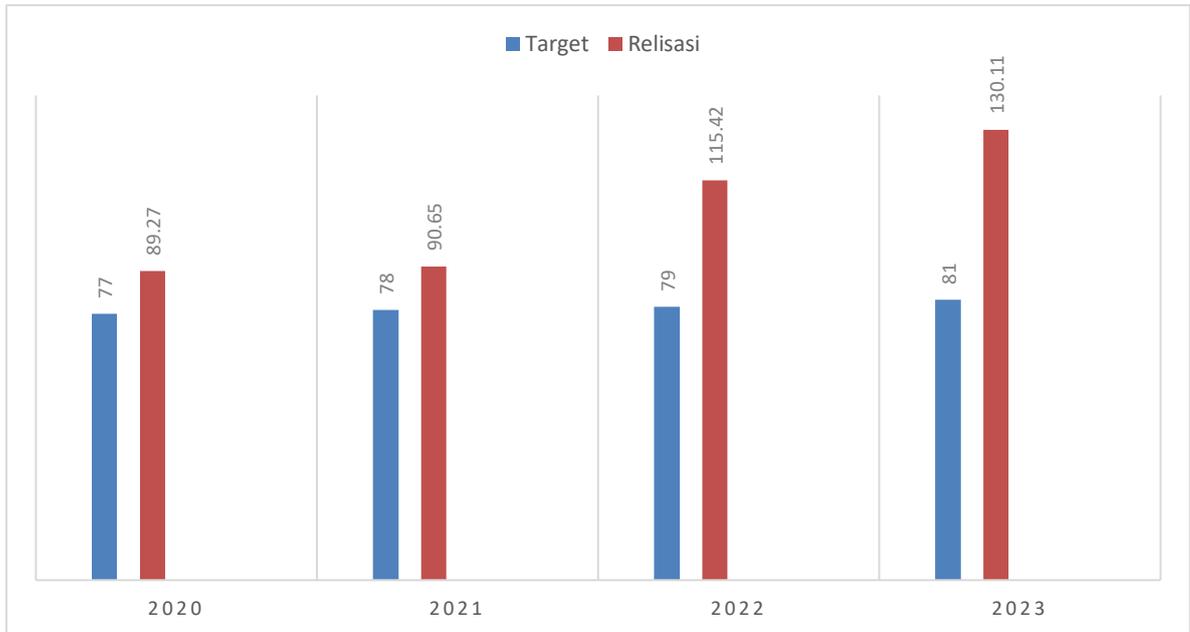
Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra Kantor Kecamatan Tomoni periode 2021-2026, perbandingan yang dilakukan dimulai data awal tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Kantor Kecamatan Tomoni. Tahun 2021 dan 2022 kantor kecamatan tomoni membagikan kuesioner setiap tiga bulan atau tiap triwulan. Tahun 2023 jumlah responden dalam setahun sebanyak 219 responden. Kuesioner yang dibagikan kepada pasien/keluarga adalah mengacu ke PERMENPAN-RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat ini memuat 9 unsur, yaitu memuat tentang 1.persyaratan, 2. system, mekanisme dan prosedur, 3. waktu penyelesaian, 4. Biaya/tariff, 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan , 6.kompetensi pelaksana, 7. Perilaku pelaksana, 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana Berikut gambaran capaian kinerja 2 (dua) tahun periode renstra 2021- 2026 Kantor Kecamatan Tomoni :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	2020	77	89,27	Tinggi
2		2021	78	90,65	Sangat Tinggi
3		2022	79	115,42	Sangat Tinggi
4		2023	81	130,11	Sangat Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Grafik 3.1
Perbandingan target dan realisasi dari tahun ke tahun



Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditentukan dengan tingkat capaian diatas 100% dengan katagori Sangat Tinggi ($91 \leq 100\%$).

3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

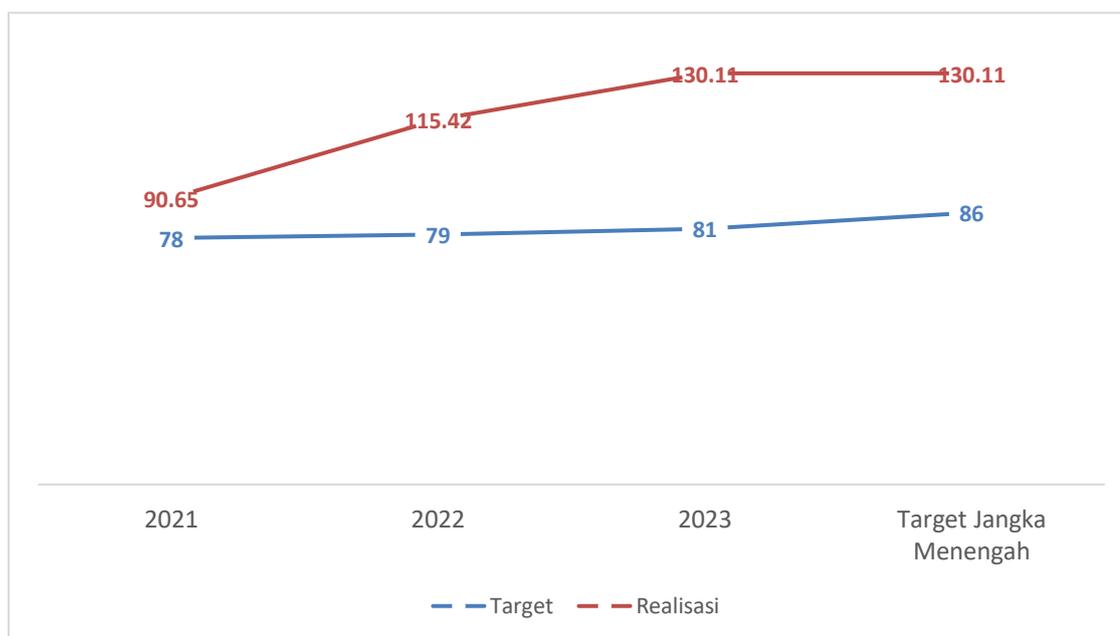
Berikut ini table realisasi Kantor Kecamatan Tomoni sampai dengan tahun 2023 yang dibandingkan dengan target renstra periode 2021-2026.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi IKU Sasaran 1 dengan Target Akhir
Renstra Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	130,11	151%

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi hingga tahun 2023
dan target jangka menengah



Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2023 sebesar 130,11. Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 86, jika Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2023 adalah 151%. Target hingga akhir

periode renstra memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Tomoni untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tomoni dapat terwujud.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan. Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yaitu :

- a. Camat melakukan rapat kordinasi dengan kepala seksi untuk senantiasa selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menghimbau kepada para kepala seksi untuk tidak meninggalkan ruangan kosong, setidaknya harus ada 1 orang staf yang diminta untuk *stand by* didalam ruangan.
- b. Meminta kepada kepala seksi untuk menempelkan syarat-syarat pelayanan di papan informasi sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung apa saja persyaratan atas pelayanan yang mereka butuhkan.
- c. Melakukan rapat kordinasi untuk menyesuaikan kembali SOP pelayanan yang akan dilaksanakan pada kantor kecamatan tomoni.
- d. Mengaktifkan kembali media social kantor kecamatan tomoni sebagai salah satu wadah penyampaian kritik, saran dan masukan dari masyarakat.

- e. Mengaktifkan kembali website kantor kecamatan tomoni dan Sistem Informasi dan Publikasi sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pemerintahan pada kantor kecamatan tomoni seperti yang telah direkomendasikan oleh inspektorat untuk mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, IKU, Rencana Aksi, dll).

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain :

- a. Sarana prasarana masih belum terpenuhi sesuai standar dan kegiatan pemeliharaan masih belum optimal karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Kondisi ini memberikan dampak cukup besar terhadap kepuasan masyarakat.
- b. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten pada kantor kecamatan tomoni juga memberikan pengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
- c. Kurangnya kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pada kantor kecamatan tomoni khususnya yang berkaitan dengan pelayanan.
- d. Belum jelasnya SOP pelayanan yang digunakan pada kantor kecamatan tomoni juga memberikan pengaruh cukup besar terhadap kepuasan masyarakat. Sebab, masyarakat yang datang untuk menerima layanan pada kantor kecamatan tomoni seringkali merasa bingung dengan prosedur pelayanan yang ada.
- e. Belum menerapkan system pelayanan satu pintu.

Solusi yang dapat dilakukan adalah :

- a. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia pada kantor kecamatan tomoni;
- b. Sejak akhir tahun 2023, pemerintah kecamatan tomoni sudah menyusun jadwal piket pelayanan yang diharapkan untuk dapat selalu siap sedia ketika ada masyarakat yang datang untuk menerima layanan;
- c. Menambahkan alokasi anggaran yang digunakan khususnya untuk meningkatkan mutu pelayanan pada kantor kecamatan tomoni, seperti

belanja modal meja pelayanan, belanja banner-banner yang rencananya akan digunakan sebagai bahan sosialisasi persyaratan pengurusan administrasi;

- d. Membuat inovasi dan mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan.
- e. Mengusulkan rehabilitasi berat kantor kecamatan tomoni agar bangunan kantor lebih memenuhi standar pelayanan.
- f. Melakukan kordinasi terkait penyusunan SOP pelayanan.

5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Tomoni dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Indikator ini didukung oleh 5 program, 7 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Pagu anggaran yang digunakan adalah **Rp. 379.646.998,-** dan realisasi anggaran **Rp.378.321.003,-** ada efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.325.995,- dengan tingkat efesiensi 0,4%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum semua program mendukung keberhasilan pencapaian indicator kinerja utama yang diwujudkan dalam pernyataan kinerja. Untuk pencapaian sasaran strategis tidak hanya didukung oleh salah satu program saja namun ke-5 program yang telah ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja meningkatnya mutu pelayanan adalah :

- a. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**
 - ❖ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada tahun 2021 kegiatan perizinan hanya dilakukan sampai dengan bulan Juli, sejak tanggal 2 Agustus 2021 tidak ada lagi pelaksanaan perizinan di Kecamatan, menunggu peraturan yang baru terkait pelaksanaan perizinan, untuk sementara pelaksanaan perizinan seperti IMB dan yang lainnya diambil alih oleh kabupaten.

Hambatan : Belum ada peraturan yang baru terkait pelaksanaan pelayanan perizinan di kecamatan. **Solusi** : Tetap memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbaru dan mengkoordinasikan dengan bappelitbangda terkait perbaikan indikator kinerja pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, sebab pada dasarnya kepala seksi pelayanan umum pada kantor kecamatan, tidak hanya menangani terkait perizinan dan non perizinan tetapi masih banyak hal lain yang menjadi tanggung jawab kepala seksi pelayanan seperti pelayanan administrasi kependudukan..

b. Program Pemberdayaan Masyarakat

❖ Koordianasi kegiatan pemberdayaan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang mencapai 30%. Musrenbang Kecamatan Tomoni dilaksanakan pada Bulan Maret 2023, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 7 kegiatan prioritas dengan total 91 usulan. Setelah dilakukan musyawarah dan verifikasi oleh BAPPEDA, usulan yang terealisasi pada tahun 2024 sebanyak 34 kegiatan prioritas. **Hambatan** : Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang. **Solusi** : Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pelaksanaan musrenbang.

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK pada 12 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Tomoni. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu : Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan, Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan, dan Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan. Sepanjang tahun 2023 PKK kecamatan tomoni melakukan beberapa kegiatan diantaranya lomba kreasi menu, lomba tertib administrasi, jamboree PKK yang dilaksanakan di Kabupaten Selayar dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Kegiatan PKK pada tahun 2023 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa/Kelurahan dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. **Hambatan** : Sumber Daya Manusia terbatas. **Solusi** :Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di kelurahan tomoni pada tahun 2023 adalah pemeliharaan drainase, pemeliharaan gedung pertemuan, penataan halaman kantor kelurahan (pavin blok). **Hambatan** : Terbatasnya anggaran. **Solusi** : Tetap melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Merekrut anggota linmas merupakan salah satu bentuk memberdayakan masyarakat di kelurahan tomoni, selain itu dilakukan juga pelatihan bagi linmas kelurahan tomoni.

Hambatan : belum ada data berkaitan dengan kelompok masyarakat yang bisa di berdayakan di kelurahan tomoni. **Solusi** : membentuk dan mendata kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat mempermudah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tomoni.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- ❖ Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Target pada sub kegiatan ini adalah persentase Upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial lainnya yang di fasilitasi. Sepanjang tahun 2023 tidak ada kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang di selesaikan sampai di tingkat kecamatan, artinya persoalan ataupun sengketa di masyarakat mampu di selesaikan sampai pada tingkat desa. **Hambatan** : Pemerintah desa tidak pernah mengirimkan laporan ke kecamatan terkait kasus-kasus atau sengketa yang telah di selesaikan di tingkat Desa/Kelurahan ataupun laporan terkait kasus/sengketa yang harus di bawa sampai di tingkat kecamatan. **Solusi** : menyampaikan pada pemerintah desa untuk selalu menyampaikan kepada kecamatan (melalui persuratan) apabila ada kasus-sengketa yang telah di selesaikan di tingkat Desa/Kelurahan. Atau pun kasus yang harus di bawa sampai ke tingkat kecamatan.
 - Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Masyarakat
Target pada sub kegiatan ini adalah jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan. Sepanjang tahun 2023 pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan. Pertemuan paling banyak dilaksanakan ketika memasuki puasa, tahun baru ataupun hari-hari besar yang lain.

Sebagai upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban di masyarakat. **Hambatan** : Pada umumnya tidak ada hambatan yang berarti pada pelaksanaan sub kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di kecamatan tomoni selama tahun 2023. **Solusi** : Tetap berusaha menjaga keamanan dan ketertiban di kecamatan tomoni dengan melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

- ❖ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Target pada sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan. **Hambatan** : kurangnya informasi apabila ada peraturan baru yang diterbitkan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apabila ada aturan baru yang harus di patuhi. **Solusi** : Lebih aktif dalam mencari informasi berkaitan dengan aturan-aturan baru yang harus di sosialisasikan kepada masyarakat.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Target yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) adalah semua rekomendasi yang masuk dikecamatan 100% harus diselesaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimka dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dibahas oleh lintas sektor se-Kecamatan

Tomoni. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimka Tahun 2023 : 1) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait penanganan sampah dilingkungan Kecamatan Tomoni, 2) Rapat koordinasi berkaitan dengan persiapan pelaksanaan shalat Idul Fitri di Kecamatan Tomoni, 3) Persiapan HUT Republik Indonesia ke 77 di kecamatan Tomoni, 4) Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan MTQ, 5) Rapat terkait persiapan roadshow budaya, 6) Rapat terkait persiapan safari ramadhan. **Hambatan** : Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Tomoni belum maksimal. **Solusi**: Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- ❖ Fasilitasi, rekomendasi dan koordianasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Target dalam sub kegiatan ini adalah terbentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sehingga APBDes dapat dicairkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 12 Rancangan Peraturan Desa dan 12 Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan total 24 Peraturan yang dibuat oleh Desa sebelum memasuki tahun anggaran 2023, Rancangan Peraturan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD, setelah diverifikasi, Rancangan Peraturan tersebut kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebelum APBDes dicairkan, Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Tomoni untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes. Pada pertengahan tahun berjalan akan terjadi perubahan anggaran sehingga desa akan membuat 12 Peraturan Desa (Perubahan) dan 12 Peraturan Kepala Desa (Perubahan). Sehingga total Peraturan

terkait APBDes yang dibuat oleh desa selama 1 (satu) tahun adalah sebanyak 48 Peraturan. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran. **Hambatan** : Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes, Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan, dan Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa. **Solusi** : Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait, Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya, dan Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.

- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan

Target dari subkegiatan ini adalah jumlah kawasan pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya. Kegiatan ini dilaksanakan bertahap dalam IV (empat) triwulan, dimana pada setiap triwulan akan menghasilkan 1 (satu) dokumen hasil monitoring dan evaluasi. Sehingga secara keseluruhan, dalam 1 (tahun) kegiatan ini akan menghasilkan 4 dokumen hasil monitoring dan evaluasi bagi desa yang mendapatkan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus). **Hambatan** : 1) Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) merupakan hal yang baru di Kabupaten Luwu Timur sehingga masih di perlukan persamaan persepsi antara Desa, Kecamatan dan stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan ini. 2) Aturan terkait pelaksanaan BKK terlambat di publikasikan, sehingga desa dan kecamatan yang secara teknis melaksanakan kegiatan mengalami beberapa kesulitan. **Solusi**: 1) Menyatukan persepsi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 2) Secara aktif mencari informasi terkait aturan-aturan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

**Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

1) Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2023 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023 :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Tomoni	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	%	100	97,80	97,80%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dari table 3.7 diatas dapat dilihat bahwa indicator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor kecamatan tomoni realisasi 97,80 yang menggambarkan telah capai target dengan tingkat capaian 97,80% atau katagori **Sangat Tinggi** ($91 \leq 100\%$)

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Terakhir

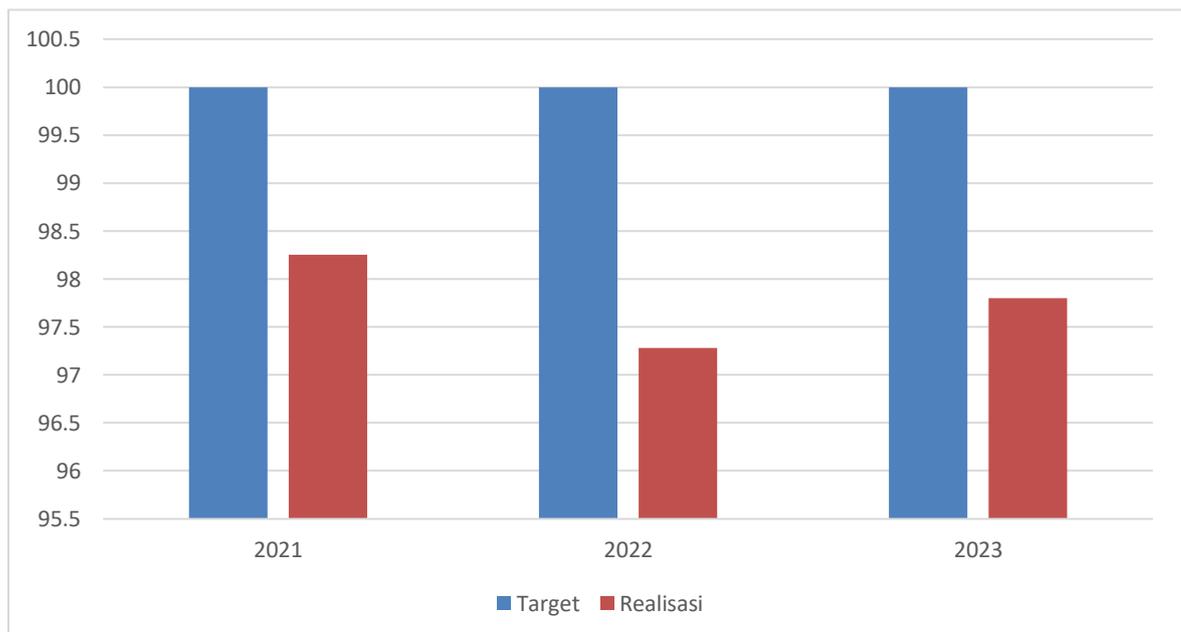
Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	2021	100	98,25	98,25	Sangat Tinggi
2		2022	100	97,28	97,28	Sangat Tinggi
3		2023	100	97,80	97,80	Sangat Tinggi

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi tahun tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2021 sampai tahun 2023 bahwa pada tahun 2021 Persentase capaian kinerja mencapai 98,25% dengan predikat sangat

tinggi. pada tahun 2022 penurunan dari tahun sebelumnya dengan persentase 97,28% dengan predikat sangat tinggi. Dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dengan mencapai persentase 97,80% dengan Kategori **sangat tinggi (91 ≤ 100%)**.

3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi s/d tahun 2023	Capaian
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100	97,78	97,78

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 yang mencapai 97,78 maka realisasi sampai dengan tahun 2023 yang merupakan tahun ke-2 periode renstra 2021-2026 telah menunjukkan trend yang positif Kategori **sangat tinggi (91 ≤ 100%)**.

4) Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh kantor kecamatan tomoni dalam meningkatkan persentase capaian kinerja berdasarkan rekomendasi inspektorat, sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat evaluasi kinerja internal pada setiap triwulan;
- b. Melakukan kordinasi dengan seksi dan subbag terkait kinerja masing-masing

- c. Melakukan kordinasi dengan bappelitbangda terkait pelaksanaan kinerja pada kantor kecamatan tomoni.
- d. Melakukan kordinasi dengan BKAD terkait pelaksanaan penganggaran yang mendukung pencapaian kinerja pada kantor kecamatan tomoni.
- e. Melakukan Evaluasi Berjenjang yang dimulai sejak triwulan IV tahun 2023

Hambatan-hambatan yang dialami :

- a. Masih ada keterlambatan penyampaian laporan kinerja pada seksi dan subbag yang di akibatkan kurangnya komitmen pada ketepatan waktu penyelesaian laporan/ penyusunan data.
- b. Masih kurangnya fasilitas peralatan perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kantor.
- c. Masih kurangnya tenaga (SDM) yang tersedia
- d. Koordinasi yang belum optimal antara seksi dan subbag.

Hal-hal yang bias dilakukan untuk meminimal masalah yang ada (**Solusi**) yang bias dilakukan, adalah :

- a. Meningkatkan komitmen seksi dan subbag dengan menyusun rencana kerja seksi dan subbag sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Menyediakan fasilitas peralatan perkantoran sesuai kebutuhan pelayanan administrasi kantor.
- c. Lebih meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat rutin/ berkala yang lebih efektif
- d. Melaksanakan tertib administrasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PN S	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	-	2
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	5	1	3	2
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	4	1	1	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	4	1	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	4	1	1	0
8	Kasi Pelayanan Umum	1	4	1	1	2
JUMLAH		8	25	8	7	8
TOTAL		33		23		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Tomoni belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Tomoni yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa).

Indikator Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan ini didukung oleh 1 program dengan 9 kegiatan. Pagu anggaran yang digunakan adalah Rp. 4.334.331.227,- dan realisasi anggaran Rp.4.154.843.645,- ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 179.487.582,- dengan tingkat efisiensi 4,1%.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan adalah :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan. **Hambatan** : Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan dan Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan. **Solusi:** Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, **Hambatan/Kendala** : Keterlambatan pengumpulan data untuk bahan LAKIP dari Kepala

Seksi. **Solusi** : Menekankan kepada kepala seksi untuk segera menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.

❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan tomoni sebanyak 29 orang (dengan kelurahan). Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Tomoni.

▪ Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah

▪ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di kantor kecamatan tomoni dilaksanakan dengan persentase 100%. . **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK) dan Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal. **Solusi** Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan dan Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

▪ Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, **Hambatan/Kendala** Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : Data Los dan Kios masih belum akurat dan Masih sering terjadi tunggakan dalam pembayaran pajak retribusi; **Solusi** Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Melakukan pemutakhiran data kios dan los sebagai bahan dalam melakukan pemungutan pajak retribusi; dan Secara rutin melakukan penagihan dalam rangka memaksimalkan pemungutan retribusi.

❖ Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan, **Hambatan/Kendala** : kurangnya anggaran dalam pelaksanaan bimtek sehingga terdapat ASN yang tidak bisa di fasilitasi untuk mengikuti bimtek. **Solusi** : menambahkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan bimtek di perubahan anggaran dan di anggaran pokok tahun 2023.
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Fasilitasi kunjungan tamu;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD., **Hambatan/Kendala** Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan dan Keterbatasan Anggaran. **Solusi** untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan dan Melakukan inventarisasi kebutuhan barang, ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan, Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder dan Memaksimalkan anggaran yang telah di sediakan. Adapun hal yang **mempengaruhi keberhasilan capaian indikator** tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf.
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya **Hambatan/Kendala** Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK),

Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal, Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan, dan Terlambatnya penginputan melalui Aplikasi pengadaan barang dan jasa. **Solusi** Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan, Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan, Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan dan Melakukan percepatan penginputan proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi.

❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Hambatan/Kendala Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK), Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal, dan Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

Solusi Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan, Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan, dan Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Hambatan/Kendala Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

Solusi Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan dan Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang apa pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran APBD untuk Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp. **4,738,183,425,-**. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp.**4,557,367,162,-** dengan capaian **96,18%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Progran Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,965,646	11,861,000	99.13%
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,805,700	2,785,500	99.28%
			Koordinasi dan Penyusunan	2,876,400	2,765,500	96.14%

		Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,696,400	3,696,000	99.99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2,825,993,091	2,681,763,450	94.90%
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	6,200,000	6,198,825	99.98%
	Administrasi Barang Milik daerah Perangkat daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,985,000	1,904,900	95.96%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	26,030,000	25,970,000	99.77%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4,916,400	4,760,300	96.82%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53,240,000	46,840,250	87.98%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,238,050	5,238,000	100.00%

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	0.00%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,574,500	48,562,225	99.97%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,390,900	10,390,900	100.00%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,040,000	8,030,000	99.88%
			Fasilitas Kunjungan Tamu	185,910,000	185,900,000	99.99%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290,620,000	290,563,858	99.98%
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28,000,000	25,170,000	89.89%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102,000,000	94,600,000	92.75%
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,422,000	23,418,600	99.99%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,689,740	46,839,401	92.40%
			Penyediaan Peralatan dan	18,500,000	15,120,000	81.73%

			Perlengkapan Kantor			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418,800,000	418,800,000	100.00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123,062,400	112,635,100	91.53%
			Pemeliharaan Mebel	1,950,000	1,950,000	100.00%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,460,000	18,355,000	99.43%
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,965,000	60,724,500	99.61%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,676,300	2,676,300	100.00%
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	16,355,900	16,325,800	99.82%

			di Desa			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90,224,155	89,949,325	99.70%
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Pra sarana	185,800,000	185,411,648	99.79%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54,640,000	54,334,000	99.44%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2,999,793	2,889,100	96.31%
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,801,405	5,660,530	97.57%
		Koordinasi Penerapan Perda dan Perkada	Kordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian	2,999,445	2,974,300	99.16%

			Negara Republik Indonesia			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18,150,000	18,100,000	99.72%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7,315,200	7,313,500	99.98%
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	16,890,000	16,889,350	100.00%
JUMLAH RATA-RATA				4,738,183,425	4,557,367,162	96.18%

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERBAIKAN BERDASARKAN LHE KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi kinerja pemerintah daerah sebagai upaya dalam mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2022 Nomor 700/121-37/VIII/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 dilakukan perbaikan atas evaluasi antara lain :

1. Rekomendasi Perbaikan :

Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstras, IKU, Rencana Aksi, Cascading, Pohon Kinerja, dll)

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Pada tahun 2023 dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, IKU dan Rencana Aksi, Lakip 2022, hingga DPA telah di publikasikan melalui akun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kecamatan Tomoni sebagai wahana publikasi.

2. Rekomendasi Perbaikan :

Menetapkan target penetapan kinerja yang menantang tetapi dapat di capai (tidak menetapkan target untuk zona aman)

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Untuk tahun 2023 dan 2024, target kinerja masih mengacu kepada renstra lama, namun untuk persiapan tahun 2025 telah dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali terkait target kinerja yang akan di capai.

3. Rekomendasi Perbaikan :

Melakukan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang lebih baik dengan membuat inovasi yang dapat di contoh oleh Kecamatan Lain.

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Untuk tahun 2024 dalam upaya penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, Kantor Kecamatan Tomoni akan melakukan evaluasi berjenjang melalui sistem pelaporan dan evaluasi internal (anggaran dan kinerja) atau disingkat menjadi SIMPELIN AJA dengan harapan agar dalam penyusunan dokumen perencanaan dapat dilakukan dengan berbasis kinerja sehingga lebih terukur dan terarah.

4. Rekomendasi Perbaikan :

Melakukan sosialisasi kepada semua pegawai terkait perencanaan kinerja, hasil pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas dan pelaksanaan tindak lanjut sehingga pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Sejak tahun 2023 telah rutin dilakukan rapat evaluasi kinerja pada setiap triwulan, pada kesempatan tersebut juga membahas terkait penetapan target kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan penyampaian rekomendasi terkait peningkatan kinerja pada seksi/sub bagian.

5. Rekomendasi Perbaikan :

Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja yang memuat informasi penjelasan deskripsi secara rinci dan cara mengukur kinerja yang jelas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Untuk tahun 2024 Tim Evaluasi kinerja telah menyusun rancangan pedoman teknis pengukuran kinerja dengan menyempurnakan pedoman pengukuran kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga dalam pengukuran kinerja akan memuat penjelasan secara rinci terkait cara pengukuran kinerja agar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan lebih sistematis.

6. Rekomendasi Perbaikan :

Memanfaatkan teknologi informasi pada pengumpulan data dan pengukuran kinerja sehingga meminimal human eror dan data update.

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Untuk saat ini teknologi informasi pengumpulan data dan pengukuran kinerja masih dilakukan melalui aplikasi Si Pengendali Pede dimana masing-masing kasi/kasubag, melakukan update data pada setiap triwulan. Untuk tahun 2024 pemerintah kecamatan tomoni telah berupaya menyusun sistem pelaporan dan evaluasi untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan evaluasi secara internal dan berjenjang.

7. Rekomendasi Perbaikan :

Pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja yang dibuktikan dengan adanya undangan, memimpin monev, terdapat notulen rapat pengukuran kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja serta dokumentasi pengukuran kinerja

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Pada Kantor Kecamatan Tomoni, Camat telah terlibat dalam pengambilan keputusan dan memimpin rapat monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan pada setiap triwulan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi pada saat monitoring dan evaluasi triwulanan dilakukan.

8. Rekomendasi Perbaikan :

Hasil Pengukuran Kinerja dimanfaatkan yaitu pemberian reward dan punishment atas kegagalan/ketidaktaatan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Untuk saat ini pemberian reward belum diberikan namun telah dilakukan koordinasi dengan camat dan sekcab terkait pemberian reward bagi pegawai yang telah melakukan kinerja dengan baik. Pemberian punishment saat ini masih

dilakukan melalui pemotongan tunjangan yang dihitung melalui aplikasi SI Patuh yang dikelola oleh BKPSDM.

9. Rekomendasi Pebaikan :

Membuat Kebijakan terkait hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

Tindak Lanjut Hasil Perbaikan :

Berdasarkan arahan Kepala BKPSDM untuk menyusun SKP melalui aplikasi e kinerja, sebab kedepannya e kinerja akan dijadikan dasar terhadap pembayaran tunjangan pegawai, maka sejak triwulan IV Tahun 2023 seluruh pegawai pada kantor kecamatan telah menyusun/menginput e kinerja nya masing-masing sesuai arahan BKPSDM.

10. Rekomendasi Perbaikan :

Pengukuran Kinerja seharusnya memberikan pengaruh terhadap penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja, hasil pengukuran kinerja melampirkan penjelasan terkait factor penghambat dan solusi perbaikan tidak hanya bersifat normative.

Tindak Lanjut Hasil Perbaikan :

Pada LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2022 dan Tahun 2023 telah dilengkapi dengan penjelasan terkait factor hambatan dan solusi yang dapat diberikan terhadap hambatan-hambatan yang di hadapi.

11. Rekomendasi Perbaikan :

Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi terkait pelaksanaan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan.

Tindak Lanjut Hasil Perbaikan :

Pada LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2023 telah memuat informasi terkait efisiensi anggaran.

12. Rekomendasi Perbaikan :

Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dimana hanya sebagian kecil pegawai merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja.

Tindak lanjut Hasil Perbaikan :

Sejak tahun 2023 telah digunakan aplikasi e kinerja sebagai wadah bagi pimpinan memberikan rekomendasi terhadap kinerja pegawai dan telah

dilakukan pemaparan dan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait pentingnya hasil pengukuran kinerja sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan terkait peningkatan kinerja pegawai.

13. Rekomendasi Perbaikan :

Dokumen laporan kinerja disusun sesuai dengan sistematika permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014.

Tindak Lanjut Hasil perbaikan :

Pada LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2023, sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, IKU dan Perjanjian kinerja yang tertuang didalam laporan kinerja telah dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan sehingga lebih informatif dan mudah untuk difahami.

14. Rekomendasi Perbaikan :

Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja yang memadai, dan perbandingan dengan kecamatan lain.

Tindak Lanjut Hasil Perbaikan :

Pada LAKIP Tahun 2022 dan 2023 memang belum tertuang perbandingan kinerja dengan kecamatan lain, namun telah disajikan informasi terkait perbandingan kinerja dengan target yang telah ditetapkan, perbandingan kinerja dengan target renstra, dan perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

15. Rekomendasi Perbaikan :

Dokumen laporan kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan, menginfokan kualitas atas capaian kinerja serta upaya nyata/hambatan dan menginfokan efisiensi penggunaan sumber daya.

Tindak Lanjut hasil Perbaikan :

Pada Laporan Kinerja Tahun 2022 dan 2023 telah disajikan informasi terkait upaya yang dilakukan dalam perbaikan kinerja, hambatan dalam pencapaian kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

16. Rekomendasi Perbaikan :

Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas peningkatan kinerja

Tindak Lanjut Hasil Perbaikan :

Untuk tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Tomoni telah berupaya merancang inovasi berkaitan dengan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja internal, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan melakukan evaluasi kinerja dalam upaya untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Tomoni.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tomoni Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tomoni Tahun 2023 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 130,11 dari target 81 sehingga memperoleh kategori **Sangat Tinggi** ($91 < 100$). Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Persentase capaian kinerja mencapai 97,80 % dari target 100% sehingga memperoleh kategori **Sangat Tinggi** ($91 < 100$). Pada tahun 2023 Kecamatan Tomoni telah merealisasikan Anggaran Belanja sebesar Rp. **4,557,367,162,-** dari pagu anggaran sebesar **4,738,183,425,-**. dengan capaian realisasi sebesar **96,18%** dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Tomoni telah optimal dengan mencapai realisasi anggaran dengan kategori **Sangat Tinggi** ($91 < 100$).

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Tomoni meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan defenisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP).

Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.

3. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Tomoni, Februari 2024



CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- i. PERJANJIAN KINERJA
- ii. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU